

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Pembahasan hasil penelitian yang telah dibahas dalam Bab IV dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Penerapan kebijakan asimilasi oleh Pemerintah Orde Baru sesungguhnya sangat berkaitan dengan dengan unsur kepentingan politik dan polarisasi politik yang berjalan pada saat itu. Hal tersebut dapat ditinjau dari sejak lahirnya ide asimilasi di kalangan tokoh Tionghoa yang tergabung dalam golongan asimilasionis menginginkan tercapainya pembauran total antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Ide asimilasi dianggap sejalan dengan pola politik yang dimiliki Pemerintah Orde Baru, maka dari itu sejak awal golongan asimilasionis mendapat dukungan dari Angkatan Darat dalam melawan rivalnya yaitu Baperki yang memiliki ide integrasi serta dekat dengan PKI, dan pada akhirnya ide asimilasi secara resmi dijadikan kebijakan negara.

Diterapkannya kebijakan asimilasi oleh Pemerintah Orde Baru sesungguhnya memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia yang sejak lama tak kunjung terselesaikan, dan untuk meredam konflik yang seringkali terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi yang dibangun atas dasar permasalahan warisan masa lampau untuk terwujudnya masyarakat multikultur yang dapat hidup berdampingan dengan damai dan agar etnis Tionghoa dapat diterima sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari warga masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan budaya yang dimiliki. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan asimilasi yang diwarnai oleh unsur politik tersebut menimbulkan dampak lain, yaitu adanya perasaan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa sejalan dengan segala kebijakan, aturan, dan syarat yang harus ditempuh oleh etnis Tionghoa dalam rangka melaksanakan aturan pemerintah untuk melakukan asimilasi total terhadap kehidupan masyarakat pribumi

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Secara tidak langsung, diskriminasi belum sepenuhnya terhapus pada masa Pemerintahan Orde Baru ini.

Penerapan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa oleh Pemerintah Orde Baru secara langsung menutup rapat segala ruang gerak etnis Tionghoa dalam berbagai bidang kehidupan. Selain karena untuk terciptanya asimilasi total, pemerintah menggunakan kebijakan asimilasi ini sebagai media pengawas gerak-gerik etnis Tionghoa di Indonesia. Pada awalnya kebijakan asimilasi hanya mencakup bidang sosial dan budaya dan pendidikan saja, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966 yang menetapkan peraturan ganti nama sebagai langkah awal penerapan kebijakan asimilasi, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1967 yang melarang etnis Tionghoa untuk menunjukkan identitas agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya di ruang terbuka. Dengan tujuan untuk mencapai pembauran total, maka dalam pelaksanaannya cakupan kebijakan asimilasi lambat laun semakin meluas, yaitu tidak hanya berfokus kepada bidang sosial budaya, akan tetapi diterapkan pada hampir seluruh bidang kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan tertutupnya ruang gerak etnis Tionghoa dalam berbagai bidang, kedudukan mereka terbatas serta hanya bisa melakukan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah meskipun hal tersebut di satu sisi menjadi beban bagi kehidupan mereka.

Unsur kepentingan politik juga terlihat pada sikap pemerintah yang menutup rapat ruang gerak etnis Tionghoa Indonesia dalam bidang sosial budaya, bidang pendidikan, bidang politik, dan bidang kewarganegaraan, namun memberikan ruang seluas-luasnya dalam bidang ekonomi. Pemerintah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya keahlian etnis Tionghoa dalam hal berdagang dan berbisnis untuk turut membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, maupun untuk bisnis yang didasari oleh kepentingan pribadi. Hal tersebut menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kepentingannya. Hal tersebut justru semakin mengundang konflik dan

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

memunculkan kembali prasangka negatif dari kalangan masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa yang pada akhirnya memunculkan kerusuhan-kerusuhan, dan tidak jarang etnis Tionghoa menjadi korban atas kerusuhan yang terjadi tersebut.

Dibatasinya ruang gerak dalam berbagai bidang, dan terbukanya peluang etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi pada masa Pemerintah Orde Baru juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak etnis Tionghoa yang pada akhirnya memilih untuk fokus mengembangkan potensinya dalam berdagang dan berbisnis, karena dalam bidang ini mereka tidak perlu merasa terbebani dengan segala peraturan yang ada. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pada masa Pemerintahan Orde Baru pula cenderung menyebabkan etnis Tionghoa pada saat itu menjadi apatis terhadap dunia politik dan sedikit diantaranya yang memiliki keinginan menjadi politikus. Hal tersebut pun terlihat dalam bidang pendidikan, etnis Tionghoa juga cenderung untuk memilih sekolah-sekolah yang bersedia menerima mereka tanpa harus ada perlakuan diskriminatif di dalamnya, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi yang diterapkan Pemerintah Orde Baru belum sepenuhnya berhasil menghapuskan stereotip eksklusif yang melekat pada etnis Tionghoa di Indonesia.

Diterapkannya kebijakan asimilasi di sisi lain memberikan dampak yang signifikan dalam membangun masyarakat Indonesia yang multikultur, meskipun dalam pelaksanaannya etnis Tionghoa terbebani oleh peraturan yang menyulitkan mereka dan kebijakan asimilasi cenderung menyebabkan luntarnya kebudayaan asli mereka, akan tetapi secara tidak sadar mereka telah melakukan proses pembauran secara alamiah dengan masyarakat pribumi secara berangsur-angsur. Hal tersebut lambat laun menimbulkan adanya rasa “*sense of belonging*” sebagai warga negara Indonesia dalam diri individu Tionghoa yang melakukan asimilasi atau pembauran tersebut. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini ialah pemerintah serta masyarakat memiliki andil dalam menciptakan keselarasan hidup agar terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa, serta adanya perbedaan dari setiap etnis atau golongan tidak dijadikan alasan untuk menimbulkan konflik, namun sebagai simpul

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

kuat untuk bersama-sama membangun bangsa. Sikap diskriminasi memang sudah seharusnya ditinggalkan dari kehidupan bernegara agar tercapainya keadilan sosial sesuai dengan butir Pancasila ke 5.

5.2 Rekomendasi

1. Bagi warga Etnis Tionghoa

Hendaknya hasil proses dari asimilasi yang telah terjadi pada masa Pemerintahan Orde Baru ini agar tetap dijaga, pembauran kebudayaan agar tetap dilakukan dengan sewajarnya dan tidak didasari atas paksaan dari pihak manapun. Bagaimanapun, kebijakan asimilasi Pemerintah Orde Baru memiliki dampak positif yaitu membentuk masyarakat Indonesia yang multikultur, oleh karena itu tugas yang harus dilakukan sekarang ialah untuk tetap menjaga dan memperkuat hal tersebut agar terciptanya masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan secara damai. Selain itu, warga etnis Tionghoa diharapkan untuk tetap memiliki rasa saling menghormati terhadap kebudayaan suatu bangsa agar kehidupan yang selaras dapat dijunjung dengan baik.

2. Bagi masyarakat Indonesia

Dengan sudah banyaknya etnis Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan telah mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, hendaknya masyarakat Indonesia lebih terbuka dalam menyikapi hal tersebut dengan tidak menyamaratakan sifat yang dimiliki setiap individu etnis Tionghoa dan menghilangkan prasangka negatif yang sejak dahulu tertanam di masa sekarang ini. Sebab pada dasarnya, etnis Tionghoa sudah lebih banyak yang berorientasi kepada bangsa Indonesia setelah melalui pembauran dalam berbagai bidang kehidupannya. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat pun dapat menerima etnis Tionghoa sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki masyarakat majemuk, dan pada masa sekarang ini tidak ada lagi

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

istilah pribumi dan non pribumi. Masyarakat Indonesia juga diharapkan untuk menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati terhadap kebudayaan yang lain agar keutuhan bangsa.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, oleh karena itu perlu diperhatikan dengan seksama ketika hendak mengeluarkan suatu kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya agar terhindar dari sikap diskriminasi, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan di dalamnya. Dalam hal ini, pemerintah perlu untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya ke dalam kesatuan dan persatuan sesuai dengan semboyan yang dimiliki Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, dengan tercapainya kesadaran tersebut maka akan tercapai pula semangat gotong royong dalam membangun bangsa antar warga masyarakat serta terciptanya keselarasan dalam kehidupan berkebangsaan di Indonesia.

4. Bagi dunia pendidikan

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih dalam menambah khazanah penulisan mengenai Sejarah Indonesia khususnya pada masa Pemerintahan Orde Baru. Selain itu, kepada para guru-guru di sekolah untuk tidak hanya berorientasi kepada materi yang disampaikan dalam buku teks, namun hikmah yang dapat diambil dari suatu peristiwa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan hikmah mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada peserta didik dengan mempelajari keberagaman etnis yang ada di Indonesia. Dengan begitu, peserta didik dapat lebih menghargai perbedaan yang ada serta tidak serta merta melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa lalu seperti berprasangka buruk terhadap individu, golongan, ataupun

Levia Chessiaga, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

etnis lainnya yang dapat memicu konflik dan perpecahan bangsa, sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada kelas XII SMA, yaitu:

A. Kompetensi Inti

1. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
2. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar

- 1.5 Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.
- 2.5 Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam skripsi ini peneliti banyak menyebutkan mengenai tokoh-tokoh Tionghoa yang berperan dalam memperjuangkan pembauran etnis Tionghoa di Indonesia demi terlaksananya suatu persatuan bangsa Indonesia yang utuh dan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi peneliti tidak membahasnya terlalu dalam. Perjuangan mengenai tokoh-tokoh Tionghoa tersebut dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya jika ingin membahas mengenai topik yang serupa. Rekomendasi lain yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya ialah mengenai kiprah pendirian organisasi-organisasi Tionghoa di Indonesia, hal tersebut dapat menjadi suatu bahasan yang menarik

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

dengan mengkaji sejarah dan perkembangan orientasi politik yang dimiliki etnis Tionghoa di Indonesia.

Levia Chessiagi, 2017

KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TAHUN 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu